

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian paling selatan wilayah provinsi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Kaur berada pada koordinat $4^{\circ}32'$ – $5^{\circ}42'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}20'$ – $103^{\circ}15'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah $\pm 2.362,50 \text{ km}^2$ dengan wilayah administratif yang terbagi menjadi 15 kecamatan.⁷⁰

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan)
2. Sebelah Timur: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan)
3. Sebelah Selatan: Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung)
4. Sebelah Barat: Samudera Hindia

Bentang alamnya meliputi pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi, yang mendukung potensi sumber daya air berdaerah di wilayah Sungai Nasal dan anak-anak

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025* (Kaur: BPS, 2025), h. 40.

sungainya. Desa Darat Sawah berada di Kecamatan Kelam Tengah (koordinat $\pm 4^{\circ}33'27''$ LS, $103^{\circ}12'36''$ BT).

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kaur yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera juga memberikan potensi besar dalam sektor perikanan laut dan wisata bahari. Garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 106,6 km memiliki ekosistem laut yang beragam, sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir.⁷¹

Di bagian tengah dan utara, wilayah Kabupaten Kaur didominasi oleh kawasan perbukitan dan hutan lindung yang memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air. Kawasan ini berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menjadi penyangga utama ketersediaan sumber air bagi kebutuhan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur bendungan.

Dengan kondisi alam yang demikian, Kabupaten Kaur tidak hanya memiliki potensi sumber daya pertanian dan perkebunan, tetapi juga peluang besar dalam pemanfaatan air untuk irigasi, energi, serta konservasi lingkungan. Potensi tersebut jika dikelola secara baik akan mendukung pembangunan berkelanjutan serta

⁷¹ Pemerintah Kabupaten Kaur, *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2021-2026* (Kaur: Pemkab Kaur, 2021), h. 45.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.



Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Kaur

Sumber: Bappeda Kabupaten Kaur, 2024

Gambar 3.1 berikut menunjukkan peta administrasi Kabupaten Kaur. Titik Merah menunjukkan Lokasi Desa Darat Sawah, yang menjadi lokasi bendungan penelitian ini, terletak di Kecamatan Kelam Tengah.

2. Kondisi Demografi

Kondisi demografi merupakan aspek penting dalam menggambarkan potensi suatu daerah, termasuk dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Kaur pada

tahun 2024 tercatat sebanyak 127.020 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,36 %.⁷²

a. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari 65.411 jiwa laki-laki (51,5 %) dan 61.609 jiwa perempuan (48,5 %). Dilihat dari penyebarannya, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai 56 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kelam Tengah yakni sekitar 207 jiwa/km².⁷³

b. Struktur Umur Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur didominasi oleh kelompok usia produktif (15–59 tahun) sebesar 66,36 %. Adapun penduduk berusia anak-anak (0–14 tahun) mencapai 22,96 %, sementara penduduk lanjut usia (≥ 60 tahun) sebanyak 10,68 %.⁷⁴

Distribusi lebih rinci penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut:

1. 0–4 tahun : 10.721 jiwa (5,48 %)
2. 5–9 tahun : 10.532 jiwa (8,72 %)

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025* (Kaur: BPS, 2025), h. 51.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2024*, h. 7.

⁷⁴ BPS Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025*, h. 53.

3. 10-14 tahun : 10.036 jiwa (8,76 %)
4. 15-19 tahun : 9.070 jiwa (8,91 %)
5. 20-24 tahun : 8.901 jiwa (7,84 %)
6. 25-59 tahun : 45.400 jiwa (sekitar 35,85 %)
7. ≥ 60 tahun : 13.537 jiwa (10,68 %)

Komposisi ini menandakan bahwa Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya manusia yang besar untuk mendukung pembangunan, meskipun keberadaan penduduk usia non-produktif juga menimbulkan beban ketergantungan.

Dengan kondisi tersebut, keberadaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah dapat menjadi modal penting bagi pembangunan daerah, termasuk dalam mendukung kegiatan pemeliharaan bendungan yang menjadi objek penelitian ini. Namun demikian, pemerintah daerah perlu tetap memperhatikan pertumbuhan penduduk usia muda agar ke depan tidak menimbulkan beban ketenagakerjaan yang berlebihan.

c. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kaur pada tahun 2024 tercatat sebesar 31,07 %. Angka ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 31 orang usia non-produktif (anak-anak dan lanjut usia).

d. Tingkat Kemiskinan

Dari sisi sosial-ekonomi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kaur pada November 2023 sebesar 71,83 %, menurun dari 18,10 % pada tahun sebelumnya.⁷⁵ Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan, meskipun angka kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Bengkulu.

3. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Air Kabupaten Kaur

Struktur perekonomian Kabupaten Kaur sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur tahun 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu mencapai 41,72 persen.⁷⁶ Sektor ini meliputi komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa sawit, kopi, dan hasil perikanan laut.

Masyarakat Kabupaten Kaur sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pola mata pencaharian ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan

⁷⁵ Katadata, "17,83% Penduduk di Kabupaten Kaur Masuk Kategori Miskin (2023)", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id>, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, Pukul 10.30 WIB.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2024*, Kaur: BPS, 2024, h. 187.

sumber daya air. Bendungan dan jaringan irigasi yang ada menjadi sarana vital untuk mendukung produksi pertanian, khususnya padi sebagai bahan pangan utama. Air irigasi tidak hanya digunakan untuk pertanian, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta mendukung kegiatan ekonomi lain, seperti perikanan darat.

Selain itu, Kabupaten Kaur memiliki potensi sumber daya air berupa sungai dan danau yang tersebar di beberapa wilayah. Keberadaan bendungan di Desa Darat Sawah Kecamatan Kelam Tengah menjadi salah satu aset strategis yang mendukung keberlangsungan pertanian masyarakat. Bendungan ini berfungsi untuk menampung air, menjaga stabilitas pasokan air pada musim kemarau, serta mengurangi risiko banjir pada musim hujan.

Keterkaitan antara kondisi ekonomi masyarakat yang agraris dengan ketersediaan sumber daya air menjadikan pengelolaan bendungan sangat penting. Ketersediaan air yang stabil dapat meningkatkan hasil pertanian, menurunkan tingkat kemiskinan, serta memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Kaur. Sebaliknya, jika pengelolaan sumber daya air tidak optimal, maka potensi gangguan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat akan meningkat, seperti gagal panen, penurunan produksi, hingga berkurangnya kesejahteraan.

4. Sumber Daya Alam dan Kebutuhan Infrastruktur Bendungan

Kabupaten Kaur merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kaur tahun 2024, luas lahan pertanian mencapai sekitar 20.812 hektar yang sebagian besar digunakan untuk tanaman padi, jagung, dan palawija.⁷⁷ Selain itu, sektor perkebunan juga mendominasi dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, karet, dan kopi yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

Potensi sumber daya perairan di Kabupaten Kaur didukung oleh keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Nasal, Sungai Kinal, dan anak-anak sungainya yang bermuara ke Samudera Hindia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Kaur memiliki potensi besar dalam pengembangan irigasi pertanian serta penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat. Namun, ketersediaan air ini sangat bergantung pada pengelolaan yang tepat melalui infrastruktur sumber daya air, salah satunya bendungan.

Keberadaan bendungan di Kabupaten Kaur menjadi kebutuhan strategis karena mampu menyediakan pasokan

⁷⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2024*, Kaur: BPS, 2024, h. 45.

air yang stabil untuk irigasi pertanian, terutama pada musim kemarau. Selain itu, bendungan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian banjir yang kerap terjadi di wilayah dataran rendah saat curah hujan tinggi. Infrastruktur bendungan juga berpotensi mendukung penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri kecil, serta membuka peluang pengembangan sektor perikanan darat.

Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten Kaur, khususnya dalam sektor pertanian dan perkebunan, menuntut adanya dukungan infrastruktur bendungan yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, keberadaan bendungan juga berperan penting dalam pengendalian banjir serta penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga maupun industri. Dengan pengelolaan yang baik, bendungan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Gambaran Umum Bendungan Air Kelam

Bendungan Air Kelam merupakan salah satu infrastruktur sumber daya air yang berada di Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Bendungan ini dibangun dengan tujuan utama untuk mendukung sistem irigasi pertanian masyarakat di Desa Darat Sawah dan sekitarnya, serta sebagai penampung air hujan yang dialirkan ke persawahan warga. Keberadaan bendungan ini memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

Secara fisik, Bendungan Air Kelam memiliki luasan genangan yang cukup kecil jika dibandingkan dengan bendungan besar lainnya, namun fungsinya sangat vital bagi masyarakat di wilayah tersebut. Bendungan ini dulunya berfungsi dengan baik dalam menyalurkan air ke lahan pertanian dengan luas sekitar 326 hektar, yang dikelola oleh para petani setempat secara turun-temurun. Sebagian besar petani menggantungkan hasil panen padi dan tanaman palawija dari aliran air bendungan ini.

Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat sekitar, kondisi bendungan saat ini telah mengalami kerusakan cukup parah. Struktur fisik bendungan sebagian besar telah runtuh dan menyisakan puing-puing dinding penahan air. Saluran irigasi utama juga

mengalami sedimentasi dan ditumbuhi rumput liar sehingga aliran air menjadi terhambat. Akibatnya, sebagian besar lahan pertanian warga kini tidak lagi terairi secara maksimal, terutama pada musim kemarau.

Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya produktivitas pertanian, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan lingkungan sekitar. Pada musim hujan, genangan air sering kali meluap dan menyebabkan erosi di sekitar area bendungan. Masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa kegiatan pemeliharaan dan pembersihan bendungan jarang dilakukan secara rutin, hanya sebatas gotong royong apabila terjadi kerusakan besar atau ketika diajak oleh pihak desa.

Tabel 3.1 Kondisi Fisik dan Fungsional Bendungan Air Kelam Kabupaten Kaur

No	Aspek Penilaian	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Struktur Bendungan	Rusak berat	Dinding bendungan retak dan sebagian besar mengalami longsor tanah
2	Saluran Irigasi	Tersumbat dan tidak berfungsi	tertutup lumpur dan rumput liar,

	optimal	air tidak mengalir ke sawah masyarakat
3	Debit Air Menurun drastis	Air sering kering terutama saat musim kemarau
4	Vegetasi Sekitar Bendungan	Banyak ditumbuhi ilalang dan semak liar
5	Partisipasi Masyarakat	Masih bersifat insidental Gotong royong dilakukan hanya bila ada ajakan dari pemerintah desa ⁷⁸

Bendungan Air Kelam dikelola di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kaur, melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA). Namun, pelaksanaan kegiatan pemeliharaan masih menghadapi kendala dari segi anggaran, tenaga teknis, serta koordinasi antarinstansi. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga fungsi bendungan agar tetap

⁷⁸ Hasil observasi lapangan peneliti di Bendungan Air Kelam, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, tanggal 10 September 2025.

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, meskipun belum secara optimal.

Secara keseluruhan, Bendungan Air Kelam memiliki nilai strategis bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Bendungan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi bendungan ini demi kemaslahatan bersama.

C. Struktur Pemerintah Daerah dalam Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air

1. Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya air telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat berwenang mengatur dan mengelola infrastruktur yang bersifat strategis nasional, termasuk bendungan besar yang lintas provinsi. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan

dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang berskala lokal, termasuk jaringan irigasi, embung, serta bendungan kecil yang berada di wilayah administratifnya. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk pengelolaan sumber daya air, merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan fungsi infrastruktur strategis seperti bendungan.⁷⁹

2. Kedudukan Dinas PUPR Kabupaten Kaur dalam Pemerintahan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas PUPR memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, serta sumber daya air.⁸⁰

Dalam konteks pengelolaan sumber daya air, Dinas PUPR Kabupaten Kaur berwenang melakukan

⁷⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244.

⁸⁰ Pemerintah Kabupaten Kaur, *Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*, Kaur, 2016.

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur pengairan, termasuk bendungan. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan provinsi, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VII yang membawahi pengelolaan sungai dan bendungan di wilayah Bengkulu.

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pemeliharaan Bendungan

Peran pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kaur, dalam pengelolaan dan pemeliharaan bendungan tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, pembiayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan bendungan setiap tahun.
2. Melaksanakan kegiatan pemantauan, perawatan, dan rehabilitasi bendungan.
3. Mengalokasikan anggaran daerah (APBD) untuk mendukung keberlanjutan operasional bendungan.
4. Melibatkan masyarakat sekitar dalam menjaga fungsi bendungan melalui program pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelolaan bendungan dilakukan sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya pemeliharaan bendungan secara berkala untuk menjamin keamanan, keberlanjutan fungsi, dan perlindungan terhadap risiko bencana.⁸¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan nasional dan kebutuhan lokal melalui pengelolaan bendungan secara terpadu, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air, tetapi juga untuk mendukung pembangunan ekonomi dan menjaga keselamatan masyarakat.

D. Profil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur

1. Sejarah Singkat dan Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kaur merupakan instansi pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Pembentukan Dinas PUPR Kabupaten Kaur didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kaur

⁸¹ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 tentang Bendungan*, Jakarta: Kementerian PUPR, 2023.

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, serta peraturan turunan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengatur tata kelola instansi teknis daerah. Sejak berdirinya, Dinas PUPR telah berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air, termasuk pemeliharaan bendungan di wilayah Kabupaten Kaur.

Selain itu, beberapa unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah Dinas PUPR juga ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kaur, antara lain:

1. UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Kaur.
 2. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas PUPR Kabupaten Kaur.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PUPR

Dinas PUPR Kabupaten Kaur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diperjelas dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air, termasuk operasi dan pemeliharaan bendungan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, secara normatif Dinas PUPR Kabupaten Kaur merupakan instansi yang berwenang dalam pemeliharaan bendungan yang menjadi objek penelitian ini.

Fungsi utamanya meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur.
2. Pemeliharaan dan pengawasan bendungan serta sarana air lainnya.
3. Pelaksanaan program pembangunan perumahan rakyat.
4. Pengelolaan sumber daya air dan drainase.
5. Pelayanan teknis, konsultasi, dan koordinasi dengan instansi terkait.

3. Struktur Organisasi Dinas PUPR

Struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kaur terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Cipta Karya
4. Bidang Bina Marga
5. Bidang Sumber Daya Air
6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Setiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, serta didukung oleh staf teknis dan administrasi.

4. Program Umum Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemeliharaan bendungan, saluran irigasi, dan fasilitas air lainnya.

Program umum yang dilaksanakan meliputi:

1. Pemeliharaan rutin dan periodic bendungan.
2. Peningkatan kapasitas teknis pengelolaan air.
3. Pemantauan dan evaluasi kualitas dan kuantitas air.
4. Koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air.

Program-program umum di bidang sumber daya air tersebut menjadi acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan fungsi bendungan. Melalui kegiatan pemeliharaan, peningkatan kapasitas teknis, pemantauan kualitas dan kuantitas air, serta koordinasi dengan berbagai pihak, diharapkan pengelolaan sumber

daya air dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Bab ini telah memaparkan gambaran umum Kabupaten Kaur beserta kondisi geografis, demografis, ekonomi, serta sumber daya alam yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur bendungan. Selain itu, juga dijelaskan struktur pemerintahan daerah dan profil Dinas PUPR Kabupaten Kaur sebagai objek penelitian. Uraian ini menjadi dasar penting untuk analisis implementasi Pasal 87 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2023 yang akan dibahas pada Bab IV.

